KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Polisi Parlemen ditolak Ketua BURT tak masalah
Tanggal : Kamis, 16 April 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Polisi Parlemen Ditolak Ketua BURT Tak Masalah

Wacana pembentukan polisi parlemen ditolak fraksi-fraksi partai politik anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Golkar mendukung wacana ini dengan berkaca pada pengrusakan ruang fraksinya.

KETUA Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roemkono tidak mempersoalkan penolakan itu. Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, pembentukan polisi parlemen bukan untuk menjauhkan para anggota DPR dari rakyat. Melainkan semata-mata agar pengamanan lingkungan DPR lebih terjamin.

"Kami tidak ngotot, karena usulan itu bukan berasal dari BURT DPR. Usulan itu kajian Badan Legislasi DPR yang disesuaikan dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital," kata Roemkono kepada *Rakyat Merdeka*, tadi malam.

Roemkono berharap fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat; PDI Perjuangan, Nasdem dan Fraksi PKB tidak salah sangka. Karena usulan itu masih wacana, belum menjadi keputusan DPR.

Politikus Koalisi Merah Putih (KMP) itu senang wacana pembentukan polisi parlemen ditanggapi banyak pihak. "Banyak yang menanggapi berarti ide ini menarik. Buktinya, di antara tanggapan itu berbentuk masukan," ujar Roemkono.

Dia menegaskan, Fraksi Partai Golkar setuju pembentukan polisi parlemen untuk peningkatan pengamanan lingkungan Senayan.

Menurutnya, pengamanan internal parlemen selama ini kurang optimal. Dia merujuk insiden upaya masuk paksa sejumlah orang ke ruang Fraksi Partai Golkar di lantai 12 Gedung Nusantara DPR. Petugas pengamanan internal DPR terbukti tidak sanggup, hingga pimpinan Fraksi Golkar DPR terpaksa menelpon Wakil Kapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti agar mengerahkan aparat Kepolisian ke lokasi.

Anggota DPR terpilih dari Provinsi Gorontalo itu menambahkan, setiap hari gedung DPR dikunjungi 5.000 hingga 6.000 tamu dengan berbagai kepentingan, "Jika tak ada jaminan keamanan, bisa masalah. Bisa saja ada tamu berniat jahat."

Menurut Roemkono, lingkungan DPR merupakan parlemen paling terbuka dan paling bebas sedunia. "Semua orang bebas datang ke DPR. Sebetulnya itu baik-baik saja, karena DPR rumah rakyat. Tapi minimal lingkungan parlemen sebagai objek vital negara perlu dijaga aparat kepolisian, seperti parlemen-parlemen di negara lain. Agar semuanya lebih tertib dan sama-sama nyaman," demikian Roemkono.

Sebelumnya, kalangan politikus Koalisi Indonesia Hebat menolak gagasan pembentukan polisi parlemen. Alasannya, selain bukan keperluan yang mendesak, salah-salah bisa menjauhkan DPR dari rakyat.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR, Johnny G Plate, menegaskan, fraksinya menolak wacana yang dilontarkan Ketua BURT Roemkono Menurutnya, lebih baik DPR memaksimalkan peran aparat pengamanan dalam atau Pamdal. "Kami menolak, pembentukan itu belum perlu. Situasi parlemen saat ini biasa-biasa saja," ujar Johnny di DPR, kemarin.

Menurut Johnny, banyak anggota Pamdal berstatus outsorching, ini yang mestinya dipikirkan, bukannya membentuk polisi parlemen. "Lebih baik perbaiki standar pengamanan. DPR kan rumah rakyat, kalau pengamanan diperketat aspirasi rakyat pasti terhambat. Anggota DPR akan jauh dari rakyat," tegasnya.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanudin, juga menolak pembentukan polisi parlemen. "Pembentukan polisi parlemen yang independen tidak perlu. Aparat kepolisian yang bertugas di parlemen harus bagian dari kepolisian. Misalnya, karena gedung DPR ini masuk wilayah Jakarta Pusat, maka tugas Polres Jakarta Pusat memberikan pengamanan," kata Hasanuddin.

Politikus Fraksi PKB Lukman Edy juga berpendapat, pembentukan polisi parlemen belum perlu, karena situasinya aman-aman saja. Yang diperlukan adalah mengoptimalkan fungsi Pamdal yang diperkuat personil kepolisian. "Kepolisian pengamanan objek vital negara kan sudah ada. Kalau kurang, minta tambah aparat kepolisian," demikian Lukman Edy. ■ HPS